

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL**

Fenomena yang sangat menarik dalam hubungan internasional pada paruh kedua abad ini adalah arus perjalanan manusia di seluruh dunia yang meningkat luar biasa sebagai akibat dari peningkatan perjalanan antar Negara untuk keperluan bisnis dan profesional, pariwisata, belajar ke luar negeri, maupun perpindahan pengungsi yang menghindari kericuhan politik di negerinya sendiri.

Fenomena ini sangat menakjubkan karena perjalanan manusia antar negara tersebut paling besar dilakukan untuk keperluan pariwisata, sehingga perkembangan pariwisata tersebut nampaknya merupakan industri yang memang ditakdirkan untuk dunia ketiga. Matahari yang melimpah di dunia ketiga, merupakan aset penting di jaman dimana orang kulit putih menggagungkan warna kulit coklat akibat sengatan matahari. Buruh murah yang disediakan Negara-negara itu menarik minat para investor perhotelan, yang menghadapi persoalan meningkatnya upah buruh dan biaya operasi di kota-kota besar Negara-negara industri, sehingga pariwisata menduduki peringkat kedua sesudah minyak sebagai penghasil devisa terbesar bagi dunia ketiga.<sup>1</sup>

Arti pentingnya industri pariwisata bagi suatu perekonomian negara tidak saja dirasakan oleh negara-negara maju melainkan juga oleh negara-negara berkembang seperti halnya dengan Indonesia yang telah menempatkan sektor

---

<sup>1</sup> Mochtar Mas' oed, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan* (pustaka pelajar) hal 193

pariwisata dalam 5 besar unggulan ekonomi yang terlihat dalam GBHN 1999-2004 yang menempatkan pariwisata dalam 5 besar unggulan ekonomi, disamping pertanian, kehutanan, kelautan dan pertambangan.

Meluasnya dukungan dan bantuan pemerintah dalam pembangunan pariwisata, dan mulai meningkatnya keterlibatan dari usaha kecil sampai dengan perusahaan multinasional dalam rangka berkontribusi dan mengarahkan keuntungannya pada industri pariwisata. Kesemua bukti tersebut menggambarkan tentang semakin meluasnya rasa optimis terhadap industri pariwisata sebagai media yang kuat dalam rangka mengubah struktur ekonomi dan sosial masyarakat.

Begitu pula halnya dengan Lombok yang merupakan bagian dari propinsi NTB dan merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia. Perkembangan kepariwisataan di daerah tersebut mengalami kemajuan yang cukup pesat seperti daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang diandalkan Lombok untuk meningkatkan pendapatan daerah setelah pertanian, sebagai wahana pencipta lapangan kerja dan sarana yang efektif untuk dijadikan alternatif utama untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan dan pembangunan daerah.

Setelah diberlakukannya otonomi daerah, maka pembangunan daerah dititikberatkan pada masing-masing daerah, oleh karena itu pemerintah propinsi menjadi fokus utama kepada setiap hal yang menyangkut kebijakan-kebijakan, termasuk mengenai investasi asing, maka dari itu penulis mengambil studi kasus tentang Lombok (NTB).

Dengan latar belakang masalah diatas penulis mengambil judul **“Upaya Pemerintah daerah NTB Dalam Meningkatkan Investasi Asing Untuk Pengembangan Pariwisata (Studi kasus: Lombok)”** guna menyelesaikan tugas akhir Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mendapatkan berbagai informasi berupa data-data yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.
2. Penulis ingin mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi NTB dalam meningkatkan Investasi Asing khususnya untuk pengembangan pariwisata (Lombok).
3. Penulis ingin mengetahui kegiatan Investasi di NTB, dimana investasi harus diperhatikan oleh Pemerintah Propinsi untuk mendukung pembangunan.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi semua pihak.
5. Sebagai syarat memperoleh Gelar Kesarjanaan S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### C. LATAR BELAKANG MASALAH

Proses globalisasi dengan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi telah menjadikan dunia seolah tanpa batas. Melihat lingkungan strategis dikaitkan dengan arus globalisasi informasi tersebut telah mendorong berbagai Negara mengembangkan ketahanan budaya agar dapat bertahan dari terpaan globalisasi serta mengembangkan pariwisata sebagai usaha kemajuan ekonomi bangsanya. Upaya ini dilakukan berbagai Negara, tak terkecuali Indonesia terus berupaya mengembangkan kebudayaan dan pariwisata sebagai salah satu andalan pemerintah dalam rangka memulihkan diri dari kondisi krisis bangsa. Tidak dapat diabaikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan nasional dapat dicapai, berkat keterpaduan dan kesinergian antara kekuatan masyarakat, pemerintah, media massa dan pelaku kebudayaan dan pariwisata.

Apabila kembali kepada konsep dasarnya pariwisata adalah suatu fenomena yang dapat menimbulkan berbagai dampak yang sangat besar dalam pembangunan nasional, baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, lingkungan dan bidang-bidang lain. Oleh karena itu, pariwisata bagi negara tertentu ditetapkan sebagai *leading sector* dari perkembangan ekonominya seperti di Negara-negara maju misalnya Prancis, Jepang, dan Inggris. Demikian juga di beberapa Negara Asia seperti Cina, Malaysia, Thailand, Arab Saudi dan Uni

Emirat Arab telah mengembangkan pariwisata sebagai salah satu motor pembangunan ekonominya.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki potensi pariwisata yang berprospek cerah untuk di kembangkan, oleh karena itu Indonesia menempatkan sektor pariwisata dalam 5 besar unggulan ekonomi, disamping pertanian, kehutanan, kelautan, dan pertambangan.<sup>3</sup> Sebagai Negara yang mempunyai potensi alam serta budaya yang kaya dan beragam, pemerintah Indonesia bertekad untuk mengembangkan pariwisata, hal ini dapat dibuktikan dengan ditetapkannya daerah-daerah yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang indah dan kaya akan obyek wisata sebagai daerah tujuan wisata (DTW).

Dengan mencermati perkembangan yang terjadi dalam neraca pembangunan Indonesia dari tahun ke tahun, tidak diragukan lagi bahwa kontribusi pendanaan yang berasal dari usaha jasa pariwisata telah meningkat dengan cukup berarti, bahkan dalam perkembangannya pariwisata mempunyai peran besar dalam menopang dan menggalakkan roda perekonomian nasional, dan di harapkan pula mampu memberikan manfaat bagi rakyat, baik manfaat material, spiritual, kultural, maupun intelektual, khususnya bagi penduduk setempat.

Namun demikian hal itu belum bisa dikembangkan dengan maksimal karena umumnya terbentur dengan kendala modal usaha untuk pembangunan. Oleh karena itu dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pemerintah berusaha menarik modal asing sebagai modal awal untuk dijadikan sumber pembiayaan pembangunan.

---

<sup>2</sup> Draft Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata Nasional Tahun 2005-2009, hal. 1-3

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 1-4

Kegiatan investasi pada hakekatnya adalah rangkaian kegiatan untuk mentransformasikan sumber daya potensial menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Sumber daya alam yang ada di daerah-daerah diolah dan di manfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara adil dan merata. namun dalam memanfaatkan sumber daya alam perlu memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam, disamping untuk memberikan manfaat masa kini harus dapat pula menjamin kehidupan masa yang akan datang.

Setelah diberlakukan otonomi daerah, maka pembangunan dititikberatkan pada masing-masing daerah, oleh karena itu agar proyek yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan daerah maka seharusnya daerah lebih berperan dalam perencanaan pembangunan, karena pemerintah daerah merupakan pihak yang paling mengerti kondisi daerahnya. Namun demikian konsekuensi daripada diterapkannya otonomi daerah tersebut, maka wewenang yang diberikan untuk merencanakan pembangunan akan mengalami kendala pendanaan, dan setiap daerah tidak boleh terlampau menggantungkan diri kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu daerah harus berfikir dan berjuang keras bagaimana menghidupi daerahnya sendiri, dan salah satu alternatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan menggalakkan perekonomian dan perindustrian daerah termasuk didalamnya usaha daerah untuk menarik investor asing. Maka setiap daerah bersaing dalam upaya menarik para investor dalam negeri maupun luar negeri untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan lingkungan berusaha

kepada para investor tersebut, dan menjadi fokus utama kepada setiap hal yang menyangkut kebijakan-kebijakan, termasuk investasi asing.<sup>4</sup>

NTB yang merupakan bagian dari Negara kesatuan republik Indonesia merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata di Indonesia yang sangat potensial. Hal ini dapat dilihat dari banyak dan beragamnya aset pariwisata yang dimiliki baik berupa Obyek Wisata Alam, Obyek Wisata Budaya, Obyek Wisata Minat Khusus maupun berupa adat istiadat dan tradisi-tradisi masyarakat, atraksi kesenian, dan lain-lain yang sangat diminati oleh wisatawan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menempatkan pembangunan kepariwisataan sebagai prioritas kedua setelah sektor pertanian dalam arti luas, dan menetapkan 15 kawasan potensial yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pariwisata yaitu sembilan di Pulau Lombok dan enam di Pulau Sumbawa.

Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena terletak pada lintas perhubungan Banda Aceh-Kupang yang secara ekonomis cukup menguntungkan. Selat Lombok di sebelah barat dan Selat Makasar di sebelah utara merupakan jalur perhubungan laut strategis yang semakin ramai dari arah Timur Tengah untuk lalu lintas bahan bakar minyak dan dari Australia berupa mineral logam ke Asia Pasifik, merupakan lintas perdagangan ke Kawasan Timur Indonesia ( Surabaya Makasar). Terletak pada daerah lintas wisata dunia yang terkenal Bali-Komodo-Tanah Toraja.<sup>5</sup>

Pulau Lombok yang merupakan bagian dari propinsi NTB, dewasa ini tengah menjadi objek wisata yang berkembang pesat. Berbagai hal yang

---

<sup>4</sup> Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional* (BIGRAF Publishing, 2001)hal 86

<sup>5</sup> [www.ntb.go.id](http://www.ntb.go.id)

mendorong terciptanya situasi seperti ini antara lain yang paling utama adalah karena peran pemerintah mempromosikan Lombok sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) kepada para wisatawan terutama yang datang ke Bali. Walaupun demikian masih banyak obyek pariwisata di Lombok yang mempunyai daya tarik tersendiri dan masih alami belum dikelola secara maksimal oleh karena kendala modal untuk pengembangan, selain itu juga kawasan obyek wisata yang telah dijadikan sebagai andalan pariwisata NTB yang sebagian besar terletak di pulau Lombok masih memerlukan pembenahan lagi untuk bisa ditingkatkan menjadi tujuan wisata bertaraf internasional, Adapun hal yang paling penting untuk menunjang Lombok sebagai daerah tujuan wisata Internasional adalah masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi seperti bandar udara yang bertaraf Internasional, dan fasilitas-fasilitas lain untuk kepentingan pariwisata yang belum banyak, karena hal itu sangat mendukung bagi dunia kepariwisataan.

Pada saat ini Lombok masih bergantung dari kedatangan wisatawan asing dari daerah-daerah yang mempunyai penerbangan bertaraf internasional seperti Bali, Surabaya, dan Jakarta. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang mempunyai obyek wisata yang beraneka ragam dan banyak memiliki keunikan, pulau Lombok mempunyai potensi besar untuk dikembangkan karena hal itu merupakan suatu keuntungan bagi Indonesia secara umum dari segi ekonomi dan daerah pada khususnya sebagai pencipta lapangan kerja yang besar, yang nantinya diharapkan mampu membangun perekonomian daerah, khususnya bagi perekonomian masyarakat setempat.

## D. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis berusaha mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut :

**“Bagaimana Upaya Pemda NTB dalam Meningkatkan Investasi Asing Langsung Khususnya untuk pengembangan Pariwisata”**

## E. KERANGKA DASAR TEORI

### 1. Teori Penanaman Modal

Teori Penanaman Modal yang dikemukakan oleh Alan M. Rugman. *“the factor which determine the foreign investment are the environment variable and internalization variable”*. Teori ini menyebutkan bahwa penanaman modal asing (PMA) dipengaruhi oleh dua faktor, yakni variabel lingkungan dan variabel internalisasi.<sup>6</sup>

- a. *Variabel lingkungan* sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik Negara atau faktor spesifikasi lokasi. Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu : ekonomi, non-ekonomi dan pemerintah. Variabel ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa secara kolektif, yang secara definitif meliputi semua input yang ada di masyarakat antara lain, tenaga kerja dan modal (dana), teknologi dan tersedianya sumber daya alam dan keterampilan manajemen yang di sebut *human capital*. Adapun variabel non-ekonomi yang memotivasi masuknya modal asing adalah keseluruhan kondisi politik, hukum dan sosial budaya

---

<sup>6</sup> Alan M. Rugman, *international Bussines: Form and Environment*, New York: Mc Graw Hill Book, 1995, hal 73-92

yang melekat pada suatu Negara. Ada beberapa pengamat yang juga memasukkan faktor pemerintahan yang bersih dan beribawa pada suatu negara (*clean government and good governace*) baik tuan rumah (*host country*) ataupun pemerintah asal penanam modal itu.

- b. Variabel internalisasi** atau keunggulan spesifik perusahaan/penanam modal. Dimana setiap penanam modal sebisa mungkin mewarnai penanaman modalnya dengan karakteristik yang khas, yang ditujukan guna memaksimalkan tingkat keuntungan sekaligus sebagai faktor yang membedakan dengan penanam modal lainnya. Termasuk didalamnya adalah struktur dan keterampilan manajemen, tehnik pemasaran, riset dan pengembangan (R &D), serta orientasi strategi secara keseluruhan.

Dalam Teori Penanaman Modal yang dikemukakan oleh Alan M. Rugman menyatakan bahwa penanaman modal asing (PMA) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi. Dalam hal ini NTB secara umum dan Lombok pada khususnya sebagai tuan rumah (*host country*) harus memperhatikan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penanaman modal asing tersebut diantaranya adalah variabel lingkungan.

Variabel lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik Negara atau daerah sebagai tuan rumah (*host country*). Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu : ekonomi, non-ekonomi dan pemerintah.

- 1) **Variabel ekonomi** yang membangun fungsi produksi suatu bangsa secara kolektif, yang secara definitif meliputi semua input yang ada di masyarakat

antara lain, tenaga kerja dan modal (dana), teknologi dan tersedianya sumber daya alam dan keterampilan manajemen yang di sebut *human capital*.

Pada satu sisi, penduduk merupakan modal dasar dalam menggerakkan kegiatan pembangunan, namun di sisi lain penduduk dapat juga menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu, strategi pembangunan masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah NTB adalah “pemberdayaan masyarakat atau penduduk”, sehingga setiap penduduk dapat menjadi subyek pembangunan dan memberikan andil bagi aktifitas pembangunan yang dilaksanakan.

Tersedianya SDM yang secara kualitatif dan kuantitatif sudah cukup memadai, seiring dengan mulai meningkatnya taraf pendidikan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menjadi modal dasar untuk pembangunan. Besarnya jumlah penduduk NTB terkait dengan angkatan kerja, yaitu pencari kerja dan penduduk yang sudah bekerja, disatu sisi merupakan hal yang paling mendasar, mengingat proporsi angkatan kerja merupakan proporsi yang tinggi dari jumlah penduduk secara keseluruhan.

Dapat diamati dan dicermati bahwa NTB merupakan salah satu daerah penyedia Tenaga Kerja ke luar negeri. Prospek kesempatan kerja yang ditunjukkan dengan permintaan tenaga kerja menduduki ranking keempat nasional setelah Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa protensi tenaga kerja yang besar harus dapat lebih ditingkatkan kualitas dan manajemen pengelolaannya untuk dapat mengisi permintaan tenaga kerja, baik di dalam maupun luar negeri.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Rencana Strategis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008, hal. IV-5

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah yang diikuti dengan penyerahan P3D (peralatan, pendanaan, pembiayaan dan dokumen) maka aset yang tadinya merupakan milik pemerintah pusat diserahkan ke pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aset tersebut berupa tanah, jalan dan jembatan, bangunan air, ternak, tumbuhan dan lain-lain senilai Rp 2.030.520.158.136,11.<sup>8</sup> Jumlah aset yang dimiliki daerah menggambarkan cukup besarnya potensi Pemerintah Propinsi NTB yang memungkinkan untuk mendukung terwujudnya penanaman modal asing.

Pertumbuhan perekonomian NTB pada tahun 2006 yang mengalami peningkatan mencapai Rp 4,05 triliun berdasarkan harga konstan atau Rp 7,4 triliun berdasarkan harga berlaku, peningkatan ini banyak ditunjukkan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor tersebut memberi sumbangan pertumbuhan tertinggi yakni 1,21% diikuti sektor pertambangan & penggalian sebesar 1,12%. Sektor pertanian sendiri walaupun memiliki distribusi PDRB yang lebih besar dibandingkan sektor perdagangan, hotel & restoran, hanya mampu memberi kontribusi pertumbuhan sebesar 0,44%.<sup>9</sup>

Dengan adanya pembinaan secara kelembagaan oleh pemerintah daerah kepada para pelaku bisnis pariwisata terutama kepada para pelaku bisnis usaha jasa pariwisata dan para pengusaha kecil dan menengah pendukung pariwisata telah menjadikannya salah satu penopang perekonomian provinsi NTB yang nantinya akan menjadi salah satu andalan perekonomian NTB dimasa datang.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. IV-4

<sup>9</sup> [www.lomboknews.com](http://www.lomboknews.com)

Kebijakan nasional dalam rangka mempercepat pertumbuhan wilayah di Kawasan Timur Indonesia, dimana NTB sebagai salah satu provinsi yang berada di kawasan tersebut mempunyai peluang yang cukup besar untuk membangun sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan. Peluang ini memberikan dampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal sehingga memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

Adanya kebijakan percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) diharapkan dapat membuka peluang bagi pengembangan jaringan kerjasama (*networking*) antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga mampu meningkatkan kualitas daya saing dengan daerah lain yang lebih maju. Sebagai daerah tujuan investasi asing langsung dibidang pariwisata, pemerintah NTB telah menyiapkan sarana dan prasarana telekomunikasi yang dapat memudahkan komunikasi ke mancanegara.

Tersedianya infrastruktur dasar yang menjadi bagian penting dalam dunia pariwisata seperti sarana dan prasarana komunikasi, usaha jasa dan transportasi yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung masuknya modal asing, yang antara lain seperti telekomunikasi yang tersedia antara lain seperti berbagai macam jaringan telepon biasa dan telepon seluler, fax dan jaringan internet, tersedianya prasarana pendukung transportasi seperti bandar udara, terminal, dan tersedianya alat transportasi darat, laut dan udara, kualitas prasarana jalan dengan kualifikasi baik mencapai 62,65% dan secara nasional

berada pada posisi terbaik kedua setelah DKI Jakarta, tersedianya berbagai usaha jasa penginapan, kesehatan dan lain sebagainya.

Besarnya potensi sumberdaya alam yang dimiliki pulau Lombok (NTB) merupakan salah satu kekuatan penting yang dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Hal ini didukung oleh ketersediaan potensi sumberdaya alam yang salah satunya adalah pariwisata yang selama ini masih memiliki daya ungkit tinggi untuk dikembangkan.

Pulau Lombok (NTB) merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata di Indonesia yang sangat potensial. Hal ini dapat dilihat dari banyak dan beragamnya aset pariwisata yang dimiliki yang merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong atau menarik minat investor asing.

- 2) Adapun *variabel non-ekonomi* yang memotivasi masuknya modal asing adalah keseluruhan kondisi politik, hukum dan sosial budaya yang melekat pada suatu Negara. Ada beberapa pengamat yang juga memasukkan faktor pemerintahan yang bersih dan beribawa pada suatu negara (*clean government and good governace*) baik tuan rumah (*host country*) ataupun pemerintah asal penanam modal itu.

Proses demokratisasi yang berlangsung di Nusa Tenggara Barat beberapa tahun terakhir merupakan tahap yang paling penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan Pemilu pada tahun 2004 merupakan keberhasilan dalam membangun sistem politik yang demokratis, amandemen UUD 1945, disahkannya berbagai peraturan perundangan di bidang politik termasuk peraturan perundangan mengenai pemilihan kepala

daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, terciptanya format baru hubungan pusat dan daerah berdasarkan perundang-undangan otonomi daerah, serta adanya konsensus format baru hubungan sipil militer telah merubah kehidupan politik kearah yang lebih demokratis. Tuntutan masyarakat luas untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik serta tuntutan atas hak mengeluarkan pendapat dan aspirasi secara bebas telah menjadi salah satu karakteristik utama dalam kehidupan politik saat ini. Perubahan mendasar ini apabila dikelola secara tepat, dapat menjadi modal yang penting dalam melanjutkan proses pembangunan daerah ke depan.

Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien sangat diperlukan pembangunan di bidang hukum yang mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu pemerintah NTB telah memberlakukan berbagai upaya perbaikan yang terencana dan simultan, melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasilnya tercermin antara lain dari membaiknya tertib administrasi, membaiknya sistem kenaikan pangkat dan pembinaan PNS, serta dikeluarkannya kebijakan perampingan lembaga daerah yang rasional.

Ditinjau dari sudut sosial budaya, penduduk NTB masih tergolong tradisional yang bersumber pada kebudayaan suku asli masyarakat, yaitu suku Sasak di Pulau Lombok, suku Mbojo di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu serta suku Samawa di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Dua

kebudayaan besar yang pernah mempengaruhi perkembangan sejarah di Indonesia yaitu kebudayaan Hindu dan kebudayaan Islam masih berkembang dan berakar pada masyarakat di NTB. Gejala kebudayaan dalam kehidupan masyarakat NTB yang sangat menonjol adalah ketergantungan dan kepatuhan masyarakat terhadap tokoh-tokoh pemuka agama atau tokoh adat sebagai tokoh panutan dalam kehidupan sehari-hari, karenanya pengaruh kehidupan beragama yang sangat kental mewarnai kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh sistem patriarkis. Oleh karena itu dalam setiap pembuatan kebijakan-kebijakan baru maupun kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah terlebih dahulu diadakan sosialisasi kepada para tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat setempat untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi didalam masyarakat.

Interpretasi ajaran agama yang belum tepat sering mempengaruhi sikap dan pandangan masyarakat yang diimplementasikan pada sistem nilai sosial dan budaya sehingga mempengaruhi pandangan masyarakat. Budaya daerah di Nusa Tenggara Barat merupakan modal dasar yang sangat penting sebagai salah satu sumberdaya utama pembangunan daerah. Selain itu, budaya daerah yang sangat beragam ini mencerminkan kekayaan budaya nasional dalam bentuk kearifan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keahlian yang bersifat spesifik dan unik.

- 3) Ada beberapa pengamat yang juga memasukkan faktor pemerintahan yang bersih dan beribawa pada suatu negara (*clean government and good*

*governance*) baik tuan rumah (*host country*) ataupun pemerintah asal penanam modal itu.

Pada aspek pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi NTB berusaha mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan publik. Upaya mewujudkan Good Governance akan mampu menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien yang dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat. Berkaitan dengan upaya mewujudkan Good Governance, Pemerintah Daerah Provinsi NTB melakukan rasionalisasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.

Kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penindakan hukum, akan mengakibatkan bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah. Oleh karena itu menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk mampu merumuskan kebijakan yang dapat memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangannya.

## **F. HIPOTESA**

Upaya Pemda NTB dalam meningkatkan investasi asing khususnya untuk pengembangan pariwisata adalah :

1. Dengan meningkatkan dan mengembangkan media promosi pariwisata baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk memperkenalkan keindahan alam dan memantapkan citra pariwisata NTB sebagai daerah yang aman dan nyaman dikunjungi.

2. Dalam rangka Membangun kembali kepercayaan investor agar mau menanamkan modalnya di sektor pariwisata, karena prospek ekonominya yang tetap menjanjikan di masa datang, maka Pemda NTB telah membuat berbagai kebijakan untuk menciptakan suasana kondusif bagi masuknya investasi asing.

## **G. JANGKAUAN PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian mengenai upaya pemerintah NTB dalam meningkatkan investasi asing khususnya untuk pengembangan pariwisata (Lombok), Penulis mengambil batasan dari tahun 2003-2007 dimana tahun 2003 dicanangkan sebagai tahun Investasi oleh Presiden Megawati Soekarno Putri sehingga lebih memudahkan dan memperkecil bahasan yang akan diteliti. Namun tidak menutup kemungkinan data-data yang diambil keluar dari jangkauan penelitian apabila masih dianggap relevan untuk penulisan Skripsi ini.

## **H. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui observasi yakni dengan melihat secara seksama dan penuh perhatian terhadap objek yang diteliti dengan cara wawancara, yakni pengumpulan atau pengecekan melalui Tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkompeten memberikan penjelasan menyangkut permasalahan yang diteliti. Antara lain, Dinas kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) beserta divisi-divisinya, Dinas PEMDA Propinsi

NTB beserta divisi-divisinya, serta instansi-instansi pemerintah daerah setempat yang berkaitan dengan penelitian.

## 2. Data sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari sumber-sumber lain sebagai pendukung data primer yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti melalui buku-buku atau literatur, data dokumen, arsip, laporan kegiatan, maupun sumber lain seperti koran, majalah dan internet yang berkaitan dengan penelitian sebagai sumber data yang relevan.

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha mengemukakan masalah tentang:

**BAB I** : Berisikan pendahuluan, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, perumusan permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Mengenai kondisi umum pariwisata NTB serta perkembangannya dan langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun dan mengembangkan potensi-potensi pariwisata yang dimilikinya.

**BAB III** : Menjelaskan tentang upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam meningkatkan mutu pariwisata NTB untuk menjadi salah satu daerah

tujuan wisata unggulan ditingkat nasional maupun internasional serta faktor-faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata tersebut.

BAB IV : Membicarakan tentang langkah-langkah yang diambil pemerintah provinsi NTB untuk menarik dan meningkatkan minat para investor asing untuk menanamkan modalnya di Propinsi NTB khususnya dibidang pariwisata.

BAB V : Merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya sekaligus sebagai penutup dari penyusunan skripsi ini. Merupakan penegasan kembali atas jawaban dari pertanyaan yang ada pada pokok permasalahan dan pembuktian hipotesa.